

Penjelasan IKK Output				
IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Jalan Data	Keterangan
Kelaianan perancang jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/kota	1) Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jln lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab / Kota}}{20} \times 100\%$	35%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jln lingkungan PPLHD yang ada}}{0} \times 100\%$	Tidak ada	sda
	3) Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab / kota	$\frac{\text{Jumlah MHA yang diakui}}{\text{Jumlah usulan MHA}} \times 100\%$ <p>Masyarakat hukum adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adanya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan pemanfaatan satu wilayah tertentu secara turun temurun</p>	Tidak Ada	sda



 Kepala Dinas

Tanjung Redeb, 8 Februari 2022

BAB XV

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Rumus	: $IKLH \text{ Kab/Kota} = (IKA \ 30\%) + (IKD \ 30\%) + (ITH \ 40\%)$ $IKA = \text{Indeks Kualitas Air}$ $IKD = \text{Indeks Kualitas Udara}$ $ITH = \text{Indeks Tutupan Hutan}$
Isian Data	$IKA = 56,09$, $IKD = 85,32$, $ITH = 94,64$, $IKLH \text{ Kab} = 76,37$
Keterangan	* Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	1) Hasil perhitungan provinsi terpadat : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) $IP = \frac{CI}{L_{ij}}$ $IP = \sqrt{\frac{(CI/L_{ij})^2}{\text{rata-rata}} + \frac{(CI/L_{ij})^2}{\text{Maksimum}}}$ Rumus Metode IP : $0 \leq P_i \leq 1,0 \rightarrow \text{baik (memenuhi baku mutu)}$ $1,0 < P_i \leq 5,0 \rightarrow \text{cemas ringan}$ $5,0 < P_i \leq 10,0 \rightarrow \text{cemas sedang}$ $P_i > 10,0 \rightarrow \text{cemas berat}$	IKLH = 76.37 IKA = 56.09 IKD = 85.32 ITH = 94.64	Dibuktikan dengan dokumen pendukung

Tanjung Redeb, 8 Februari 2022

Mengetahui,
Kepala Dinas



2) IKK Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/kota			
Rumus	Total volume sampah yang dapat ditangani Total volume timbunan sampah kab / kota			x 100%
Isian Data		54,56%		
Keterangan	• Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait			

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	1) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	Tersedia Tersedia Tersedia	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Tanjung Redab, 8 Februari 2022

Mengetahui,
Kepala Dinas

H. Suladi, A.P.
NIP. 19631121 199003 1 004

BAB XXXII INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEHUTANAN

Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota
1) IKK Output

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan
	1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2) Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	1 kampung	Tumbit Melayu
	3) Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasimapun restorasi		Tidak ada
	4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekepilulasi kejadian TIPHUT secara periodik per tahun		Tidak ada

Tanjung Redeb, 8 Februari 2022

Kepala Dinas,



3) IKK Outcome : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
 Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
Rumus	$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota}}{\text{usaha dan atau kegiatan dilakukan pemerkasaan}} = 18/29 \times 100\%$
Isian Data	62,06 %
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> • Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka • Yang dimaksud dengan izin pph (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan • Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Tanjung Redeb, 8 Pebruari 2022
 Mengetahui,
 Kepala Dinas


 A.P. Sulardi
 NIP. 259631121 199003 1 004

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan	
Ketertarikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1) Data izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kab/Kota}}{\text{Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kab/Kota}} \times 100\%$	7 x 100% 20	35%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kab/Kota}}{\text{Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kab/Kota}} \times 100\%$	0 X 100% 0	Tidak ada	sda
	3) Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab / kota	$\frac{\text{Jin Lingkungan PPLHD yang ada}}{\text{Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun}} \times 100\%$	0 x 100% 0	Tidak Ada	sda

Kepala Berau, 8 Februari 2022
 Kepala Berau
 NIP. 196313271990031004

4) Terasilasilasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait terkait PPLH	<p>Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan</p> <p>0</p> <p>..... X 100%</p> <p>Jumlah MHA yang ada</p> <p>0</p>	Tidak Ada	sda
5) Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	<p>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana</p> <p>0</p> <p>..... X 100%</p> <p>0</p>	Tidak Ada	sda
6) Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang di berikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	<p>Pengaduan masyarakat yang ditangani</p> <p>12</p> <p>..... X 100%</p> <p>12</p> <p>Total jumlah pengaduan masyarakat yang terintegrasi</p>	100%	sda

Tanjung Redeb, 8 Pebruari 2022

Mengetahui,
Kepala Dinas



H. M. M. A. P. I.

NIP. 19631121 199003 1 004

**PENGADUAN YANG MASUK MELALUI POS PENANGANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (POS PPSLH)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU
TAHUN 2021**

No.	Waktu Diterima Pengaduan	Identitas Pengadu	Identitas Peserta Pengaduan	Sumber Penerimaan	Media Lingkungan yang Tercecer	Palok Aduan	Klasifikasi Pengaduan	Keterangan	
								Proses	Tindak Lanjut
1	19 Juni 2021	Irvan (Kontributor Media A-News)	Pos PPSLH DLH Kab. Berau	PT. Sentosa Kalimantan Jaya	Kerusakan Laban	Dugaan Perusakan Mangrove	Aduan Lingkungan Hidup		
2	12 Maret 2021	Ayupandi Hidayat	Pos PPSLH DLH Kab. Berau	Sarang Burung Warga	Kerusakan Laban	Pembangunan Sarang Burung di lokasi Buau Mangrove	Aduan Lingkungan Hidup		
3	21 Maret 2021	Media	Pos PPSLH DLH Kab. Berau	CV. Sungai Berlian Jaya (Developer)	Pencemaran Lumpur	Dugaan muaranya lumpur di jalan raya dampak dari penambangan Cemarua Indah Permai	Aduan Lingkungan Hidup		
4	Tindak lanjut pengaduan 2020	Tindak lanjut pengaduan 2020	Pos PPSLH DLH Kab. Berau	PT. KGW	Kerusakan Laban	Kerusakan Mangrove di luar HGU	Aduan Lingkungan Hidup		
5	18 Maret 2021	Abdul Hamid	Pos PPSLH DLH Kab. Berau	PT. Kalina Jaya Berau	Sungai	Dugaan terbunahnya alur Sungai Berau dan Pengalihan alur sungai Berau tanpa izin	Aduan Lingkungan Hidup		
6	25 Maret 2021	Media	Pos PPSLH DLH Kab. Berau	Bekempa Lokasu	Kerusakan Laban	Adanya dugaan Tambang kelubuk ilegal	Aduan Lingkungan Hidup		
7	29-Apr-21	Abdul Manur, M. Beni, M. Shahrudan (Kondekrama KASIB)	Pos PPSLH DLH Kab. Berau	PT. TBPP	Kerusakan Laban	Dugaan adanya kerusakan mangrove dan penanaman di luar HGU	Aduan Lingkungan Hidup		
8	16 Mei 2021	PT. RUB dan Media	Pos PPSLH DLH Kab. Berau	PT. RUB	Kerusakan Laban	kebudaya langgul perikanan di pal. X PT. RUB	Aduan Lingkungan Hidup		
9	27 Mei 2021	Karang Taruna Wira Giri Pari (Rival dan Dandi)	Pos PPSLH DLH Kab. Berau	PT. BAA	Kerusakan Laban	Dugaan Perusakan lahan Pakuk Mayuk Kelapa Sawit	Aduan Lingkungan Hidup		
10	24 Juli 2021	Warga (Rehmanwmy)	Pos PPSLH DLH Kab. Berau	PT. E-Tira medical center	Pencemaran	Rembesan Air dari PT. E-Tira Medical Centre ke Teras Warga	Aduan Lingkungan Hidup		
11	15 Agustus 2021	via Teip	Pos PPSLH DLH Kab. Berau	Perindik Stockfile Barubera	Pencemaran tanah	Pembangunan Stock Pile dan Penumpukan Barubera	Aduan Lingkungan Hidup		
12	30 Agustus 2021	Ahman Tompo	Pos PPSLH DLH Kab. Berau	PT. Bertarya Berkah Beraudara	Tanah	Dugaan Pencemaran Sungai	Aduan Lingkungan Hidup		

*data dukung IKK Outcome 3

-Output 6

